

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan salah satu alat pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia, karena transportasi menjadi elemen penting dalam proses pemindahan baik barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat kita jumpai hampir dalam setiap segmen kehidupan dalam masyarakat, yang mencakup suatu wilayah mulai dari ruang lingkup Kota/Kabupaten hingga mancanegara.

Kota Bandung salah satu kota besar berikut menjadi ibukota Provinsi Jawa Barat dengan memiliki “luas wilayah 167,31 km² yang terbagi menjadi 30 kecamatan dan mencakup 151 kelurahan” (BPS Kota Bandung, 2020, hlm. 4). Dalam perjalanannya pertumbuhan dan perkembangan kota Bandung tidak terlepas dari partisipasi berbagai elemen didalamnya, salah satunya ialah dari sumber daya manusia yakni masyarakat Kota Bandung dan juga keterlibatan aspek transportasi sebagai penunjang berbagai aktifitas maupun kebutuhan masyarakatnya.

Jika dilihat dari pertumbuhannya penduduk “Kota Bandung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 2.507.888 jiwa yang terdiri atas 1.263.916 jiwa penduduk laki-laki dan 1.243.972 jiwa penduduk perempuan dengan kelompok umur yang paling banyak terdapat pada usia 20-24 tahun” (BPS Kota Bandung, 2020, hlm. 40). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Proyeksi Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2019

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	0-4	100 268	96 262	196 530
2	5-9	97 256	92 702	189 958

3	10-14	86 810	83 316	170 126
4	15-19	106 374	108 412	214 786
5	20-24	132 224	123 500	255 724
6	25-29	117 650	108 690	226 340
7	30-34	108 335	99 937	208 272
8	35-39	97 014	95 903	192 917
9	40-44	93 112	94 070	187 182
10	45-49	83 849	86 414	170 263
11	50-54	74 627	75 902	150 529
12	55-59	60 992	63 231	124 223
13	60-64	41 950	41 629	83 579
14	65-69	29 764	30 654	60 418
15	70-74	18 006	19 263	37 269
16	75+	15 685	24 087	39 772
Jumlah		1 263 916	1 243 972	2 507 888

Sumber: BPS, *Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045* (dalam BPS Kota Bandung, 2020, hm. 46).

Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Bandung mengalami pertumbuhan sebesar 0,17%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,6 serta tingkat kepadatan penduduk mencapai 14,989 jiwa/km persegi (BPS Kota Bandung, 2020, hlm. 40).

Dari uraian di atas dapat mengindikasikan Kota Bandung sudah semakin padat, ditambah dengan hilir mudiknya penduduk dari daerah penyangga Kota Bandung yang melakukan aktifitas di dalam Kota Bandung setiap harinya. Hal tersebut, cukup menyita perhatian banyak pihak terlebih tingkat kepadatan penduduk diperparah dengan kepemilikan kendaraan bermotor setiap orang, dan dapat mengakibatkan permasalahan baru diantaranya ialah kemacetan hingga pencemaran. Dalam hal ini *Asian Development Bank (ADB)* melakukan survei pada awal Oktober 2019 dan merilis hasil yang mencengangkan bagi banyak pihak, bahwa “Kota Bandung adalah kota termacet ke-14 se-Asia, di atas ibu kota Negara

Jakarta yang berada di urutan 17” (Triani, 2019). Dari hasil survei tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kota Bandung menjadi kota termacet pertama di Indonesia menggeser DKI Jakarta dan Surabaya yang berada pada posisi ke-17 dan 20 se-Asia.

Kondisi tersebut menjadi satu permasalahan yang cukup pelik, dan memerlukan perhatian berbagai pihak. Demikian kemacetan tersebut bukan hanya disebabkan tingginya jumlah penduduk, akan tetapi disebabkan pula oleh meningkatnya populasi kendaraan bermotor setiap tahun, dimana pada tahun 2018 saja jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung menyentuh angka 1.738.672 unit dengan sepeda motor menjadi kendaraan bermotor terbanyak dengan jumlahnya yang mencapai 1.244.433 unit (BPS Kota Bandung, 2019, hlm. 261). Selain itu, tidak tertibnya pengendara dalam menaati peraturan berlalu lintas, kecelakaan lalu lintas, parkir sembarangan, hingga penumpukan kendaraan pada satu titik ruas jalan menjadi salah satu penyumbang dalam tingkat kemacetan di Kota Bandung yang terus meningkat. Seiring pertumbuhan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat seharusnya diimbangi dengan pelebaran ruas jalan untuk memudahkan proses transportasi. Namun, hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena semakin meningkat populasi kendaraan bermotor, ruas jalan hanya mengalami sedikit sekali pelebaran yang disebabkan terbatasnya lahan di Kota Bandung, seperti yang diperoleh dari data Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung pada Kota Bandung dalam Badan Pusat Statistik tahun 2019 berikut ini:

Tabel 1.2

Keadaan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Kewenangan di Kota Bandung (km), 2018

No	Keadaan <i>Condition</i>	Panjang Jalan (km) <i>Road Length (km)</i>
	(1)	(2)
I	Jenis Permukaan / <i>Type of Surface</i>	
	a. Hotmix / Penetrasi	1 130,16
	b. Beton / Concrete	42,62
II	Kondisi Jalan / <i>Road Condition</i>	

	a. Baik / Good	
	Jalan Nasional	-
	Jalan Provinsi	-
	Jalan Kota	986,27
	b. Sedang / Half Damage	
	Jalan Nasional	-
	Jalan Provinsi	-
	Jalan Kota	104,69
	c. Rusak / Damage	
	Jalan Nasional	-
	Jalan Provinsi	-
	Jalan Kota	81,82
	Jumlah	1 172,78
III	Wewenang Jalan	
	Jalan Nasional	43,63
	Jalan Provinsi	38,45
	Jalan Kota	1 172,78
	Jumlah	1 254,86

Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung* (BPS Kota Bandung, 2019, hlm. 262).

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, EM Ricky Gustiadi (dalam Nirmala, 2019) bahwa “Jumlah pertumbuhan kendaraan (pribadi) cukup tinggi dibanding jumlah pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan. Artinya, (jalan raya) masih didominasi pengguna kendaraan pribadi”. Dengan demikian, semakin banyak *volume* kendaraan pribadi berarti daya tampung kota untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat untuk bepergian akan semakin melemah, dan akan menimbulkan kemacetan di jalan yang tidak dapat dihindari (Netizen, 2019).

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan, maka harus ada pemecahan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Hal tersebut tentunya akan berkaitan

dengan suatu kebijakan. Sebagaimana Thomas R. Dye (dalam Nainggolan et al., 2020, hlm. 29) mengungkapkan “Kebijakan publik adalah apa yang dikerjakan Pemerintah dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah”. Dalam hal ini, pemerintah memiliki keterkaitan baik dalam penyediaan regulasi, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam upanyanya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan berlalu lintas, Pemerintah Kota Bandung telah membuat kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Namun, hal tersebut dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam penanggulangan masalah pada bidang lalu lintas, Safitri (dalam Sundari, 2014, hlm. 3), mengemukakan “untuk menanggulangi masalah kemacetan yang diakibatkan pergerakan, dan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi, diperlukan sarana angkutan umum yang mampu untuk mengakomodasi hal tersebut”. Angkutan umum dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah kemacetan dan mobilitas penduduk yang tinggi. Angkutan umum sebagai salah satu moda transportasi darat memiliki kelebihan, yaitu efisien dan ergonomis karena mampu membawa penumpang dalam jumlah yang banyak pada satu waktu bersamaan.

Dalam hal ini, transportasi publik maupun angkutan umum memiliki berbagai jenis angkutan baik barang maupun penumpang. Pada angkutan penumpang ini memiliki berbagai jenis, salah satunya angkutan kota (Angkot) maupun transportasi bus yang diharapkan menjadi salah satu cara menanggulangi tingkat kemacetan, juga sebagai upaya dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi, sehingga masyarakat dapat beralih kembali menggunakan moda transportasi publik yang disediakan dalam memudahkan proses mobilisasi setiap warganya termasuk menjaga tatanan kota sebagai bentuk dari pembangunan kota agar terbentuk tatanan dalam pengelolaan moda transportasi yang baik dan tertib sesuai fungsinya.

Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia atau yang lebih dikenal DAMRI merupakan salah satu alternatif transportasi publik yang berada di Kota Bandung disamping adanya Trans Metro Bandung (TMB). DAMRI hadir dalam

rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pada bidang jasa angkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tahun 1946, dalam perkembangannya sebagai Perusahaan Umum nama DAMRI tetap dipertahankan sebagai *brand mark* dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perbaikan dan perubahan senantiasa dilakukan oleh Perum Damri maupun Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menarik minat masyarakat agar dapat beralih kembali menggunakan kendaraan umum yang telah disediakan penyedia jasa transportasi. Perum Damri senantiasa melakukan peningkatan pelayanan baik secara internal melalui pelengkapan fasilitas dalam bus, penyesuaian tarif, kemudahan proses transaksi dan perbaikan lainnya. Sementara, secara eksternal dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pembuatan aplikasi “Smart Damri” sebagai bentuk kepedulian elemen masyarakat terhadap keberlangsungan transportasi publik di Kota Bandung agar memberikan kenyamanan serta kemudahan terhadap penumpang maupun pengguna jasa lainnya (Meiliani & Juliane, 2016; Pratama et al., 2018).

Tentunya setiap perbaikan dan perubahan tidak serta merta memperoleh hasil yang memuaskan, hal tersebut disampaikan oleh bapak Yudhiyana selaku kepala bagian Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung saat ditemui dalam proses wawancara prapenelitian pada 20 Februari 2020 yang mengungkapkan “memang pelayanan selalu ditingkatkan, akan tetapi reaksi dari masyarakat masih kurang untuk beralih menggunakan kendaraan umum”.

Demikian penggunaan jasa transportasi publik ini tidak kehilangan pengguna setianya, sebab setiap harinya jasa bus Damri banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bandung dalam melakukan aktifitasnya. Namun, hal tersebut masih tetap belum terlalu signifikan dalam menurunkan tingkat kemacetan di Kota Bandung sebagaimana dikutip pada laman pikiran-rakyat.com yang menyatakan “walaupun setiap hari yang menggunakan jasa transportasi umum terlihat banyak, namun hal ini tidak sampai setengahnya masyarakat menggunakan jasa transportasi umum. Palsanya penggunaan kendaraan pribadi mencapai 80 persen, sementara yang

menggunakan transportasi umum hanya 20 persen”. (Nirmala, 2019). Selain itu, tingkat penggunaan transportasi publik terlihat banyak setiap harinya, akan tetapi mengalami penurunan jumlah penggunanya sebagaimana dicantumkan pada data pengguna bus Damri di Kota Bandung tahun 2017, 2018, dan 2019 berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Pengguna Bus Damri Pelayanan Dalam Kota Bandung

Tahun	Trayek					Total
	Cicaheum - Cibereum	Leuwi Panjang - Ledeng	Dipatiukur - Leuwi Panjang	Cicaheum - Leuwi Panjang	Kebon Kalapa - Cibiru	
2017	1.001.398	938.443	678.820	1.160.697	1.300.509	5.079.867
2018	921.906	882.213	562.332	1.042.424	1.171.661	4.580.536
2019	723.571	784.973	479.784	925.201	1.126.655	4.040.184

Sumber: *Perum Damri Cabang Bandung (dalam Suciantriyani, 2019, hlm. 2 - 3) dan Perum DAMRI Cabang Bandung 2020.*

Dari data tersebut, sudah seharusnya menjadi perhatian bagi setiap warga masyarakat terkait pentingnya menggunakan transportasi publik guna mendukung terciptanya suasana kota yang aman, nyaman, dan tertib. Namun, kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan transportasi publik dan pemanfaatan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan ini masih dirasa kurang sehingga memerlukan peran serta dari masyarakat itu sendiri juga pihak lainnya secara bersama-sama membangun tatanan kota yang baik dengan fasilitas keamanan, kenyamanan serta ketertiban di dalamnya.

Dengan melihat uraian di atas perihal kondisi yang saat ini terjadi di Kota Bandung dengan tingkat kemacetan tertinggi se-Indonesia, juga dengan populasi kendaraan pribadi yang setiap tahunnya selalu meningkat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan jasa transportasi publik khususnya bus DAMRI. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi tentang **“Kesadaran Masyarakat Dalam Penggunaan Jasa Transportasi Publik Di Kota Bandung (Deskripsi Hasil Analisis Kesadaran Penumpang Dalam Menggunakan Jasa Bus Damri Di Kota Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penelitian, agar memperoleh hasil yang diinginkan serta kualitas penelian yang baik, seorang peneliti harus melewati salah satu proses penting dalam penelitian sebelum masuk kepada perumusan masalah yakni identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan pengenalan masalah dari suatu fenomena yang terjadi untuk kemudian dijadikan bahan dalam melakukan penelitian. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Populasi kendaraan bermotor di Kota Bandung meningkat setiap tahunnya.
2. Tingginya tingkat kemacetan di Kota Bandung.
3. Menurunnya penggunaan jasa transportasi publik di kota Bandung.
4. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyedia layanan transportasi terhadap masyarakat sebagai daya tarik dan upaya perbaikan pada jasa layanan transportasi publik.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat kesadaran penumpang dalam menggunakan jasa transportasi bus DAMRI di Kota Bandung?
2. Bagaimana peran Perusahaan Umum DAMRI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi publik di Kota Bandung?
3. Kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan oleh Perusahaan Umum DAMRI dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi bus DAMRI di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai tujuan penelitian dimulai dari tujuan umum, hingga tujuan khusus dalam penelitian yang akan dilakukan.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai kesadaran masyarakat dalam penggunaan jasa transportasi publik di Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Khusus

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai antara lain :

1. Mengetahui gambaran tingkat kesadaran penumpang dalam menggunakan jasa transportasi bus DAMRI di Kota Bandung.
2. Mengetahui peran Perusahaan Umum DAMRI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi publik di Kota Bandung.
3. Mengetahui Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum DAMRI dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi bus DAMRI di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini pada dasarnya didapatkan setelah memperoleh kegiatan penelitian, adapun beberapa manfaat yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, juga meningkatkan pemahaman terkait dengan permasalahan penelitian mengenai kesadaran masyarakat dalam penggunaan jasa transportasi publik. Adapun hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti yang memiliki minat dalam melakukan penelitian dibidang Ilmu Kebijakan Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ilmu Sosial lainnya terutama dalam konteks partisipasi masyarakat, pelayanan publik juga nilai dan moral.

1.5.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Dalam segi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pentingnya partisipasi warga negara (*civic participation*) dalam mensukseskan sebuah pelayanan yang diberikan dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan, yang dalam hal ini dikhususkan pada sektor pelayanan transportasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap setiap kebijakan dan usaha yang telah dilakukan pemangku kebijakan dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada jasa layanan transportasi bus.

1.5.3 Manfaat dari Segi Praktis

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif sehingga penulis dapat menggambarkan mengenai kesadaran masyarakat Kota Bandung dalam penggunaan jasa transportasi umum, sehingga diharapkan dapat diperoleh manfaat diantaranya:

1. Diketuainya gambaran tingkat kesadaran penumpang dalam menggunakan jasa transportasi bus DAMRI di Kota Bandung.
2. Diketuainya peran Perusahaan Umum DAMRI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi publik di Kota Bandung.
3. Diketuainya Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum DAMRI dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi bus DAMRI di Kota Bandung.

1.5.4 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Diharapkan dari hasil penelitian dapat bermanfaat dan juga memberikan informasi kepada semua pihak terkait pentingnya penggunaan jasa transportasi publik khususnya kendaraan roda enam bus damri dalam menjalankan setiap aktivitas, selain itu dapat memberikan informasi terhadap lembaga-lembaga berwenang agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.